



PERWUJUDAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Lutviana Datau¹

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Sultan Amai Gorontalo
Jalan Sultan Amay_Pone_Kec. Limboto_Kab. Gorontalo No 17, Enrekang, Gorontalo, 96181, Indonesia

*Penulis koresponden, *e-mail*: dataulutviana@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 24-04-2022

Disetujui: 29-05-2022

Kata kunci:

Sistem, Etika

Negara Hukum

Nilai-nilai Pancasila

ABSTRAK

Abstract: This study aims to determine the implementation of Pancasila values for the material principles of drafting legislation contained in Article 6 of the Constitution No. 12/2011 this study aims to provide knowledge to the public about the importance of understanding Pancasila, this research is a type of qualitative research using the roles, functions, and history contained in the values of Pancasila. Based on the results of the research and discussion, conclusions were also drawn and in the principle of material content an explanation of the values of Pancasila was made.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila untuk asas materi muatan penyusunan perundang-undangan terdapat dalam pasal 6 UUD No. 12/2011 penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan masyarakat betapa pentingnya pemahaman pancasila, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan peran, fungsi, dan sejarah yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila. Berdasarkan dalam hasil penelitian dan membahas juga dihasilkan kesimpulan dan dalam asas materi muatan telah membuat penjelasan nilai-nilai pancasila.

Pendahuluan

Pancasila merupakan sistem petunjuk bagi bangsa Indonesia saat menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, bersifat khas dan orisinal, Pancasila sangat berperan penting dalam kehidupan bangsa indonesia terutama pada era digital ini. Dalam sejarah lahirnya pancasila dimulai pada saat pembentukan BPUPKI, Bidang Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. sidang pertama BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, dalam sidang kedua ini mengatakan dasar Negara yang disepakati adalah Pancasila. Dalam pancasila terdapat lima sila: Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Sejak saat itu, Pancasila dijadikan sebagai nama falsafah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, ada beberapa urutan dan ungkapan yang berbeda untuk hal ini. Jika Pancasila sebagai dasar bangsa berarti bahwa setiap tindakan bangsa dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, pancasila berasal dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga memiliki cakupan fungsi dan peran yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemerosotan moral era globalisasi saat ini menyebabkan isu-isu besar seperti perilaku tidak etis, anarki hingga akhir permasalahan yang berujung pada penindasan atas nama agama, kebangsaan ras dan golongan, sehingga bertentangan dengan nilai dan isi yang terkandung dalam UUD Pancasila. Dalam nilai-nilai pancasila juga, bersifat Universal dan karenanya harus dihayati dalam kehidupan bangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Di era digital ini, peran pancasila sangat dibutuhkan. Karena penggunaan teknologi yang sangat besar, hal tersebut sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia terutama para pelajar bahkan kita ambil contoh dalam nilai pancasila dalam alinea ke satu yaitu tentang Ketuhanan yang maha Esa, dalam hal ini banyak masyarakat yang meninggalkan perintah dari tuhan karena kecanduan teknologi.

Dari segi pembangunan, hukum mempunyai fungsi memelihara ketertiban dan keamanan, mengembangkan sarana, penegak hukum dan pendidikan masyarakat. Sebagai bagian dari pembangunan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada nilai-nilai pancasila. Nilai-nilai pancasila berdasarkan pada teori kausalitas (sebab materialis, sebab formal, sebab sah, sebab akhir) yang dikemukakan oleh Nottonagoro, sebab lahirnya negara.

Metode

Kajian ini menetapkan penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan artikel ini, mempelajari perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di era digital ini. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (Librari reserch) agar dapat menentukan konsep perwujudan nilai-nilai pancasila di era digital secara holistik. Selanjutnya sumber data dalam kajian ini didapat melalui beberapa tahapan seperti pencarian sumber. Yang membahas terkait nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi sumber-sumber yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan mengimplikasikan yang didasarkan nilai-nilai Pancasila serta perwujudan di era digital. Kemudian penulis memenuhi data yang sudah terkumpul melalui tahapan audisi. Analisis tersebut terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan terkait perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan pedoman bernegara terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pancasila juga dasar pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum nasional Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga adalah cara ara hidup orang Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa pancasila adalah jiwa seluruh bangsa Indonesia yang dapat memberi vitalitas bagi bangsa Indonesia dan membimbingnya untuk mengejar kehidupan lahir dan batin yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pandangan hidup adalah kerangka acuan yang baik untuk mengatur kehidupan seseorang dan interaksi manusia dalam masyarakat dan lingkungan alam. Pancasila pandangan hidup. Karena pancasila adalah hasil kristalisasi. Dianggap sebagai nilai-nilai hidup terbaik. Oleh karena itu, pancasila adalah landasan, motifasi dan prestasi dalam masyarakat, negara, dan status. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai yang satu dengan nilai yang lain. Tolong dulu ya percaya dulu pada tuhan adalah prinsip utama dari empat perintah yang lainnya.

Kelangsungan hidup bangsa dan bangsa indonesia menuntut kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila agar generasi penerus bangsa dapat menghayati dan mengamalkan dan seterusnya. Itu intisari nilai-nilai luhur tersebut telah dilestarikan dan telah menjadi norma abadi bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia untuk menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Karena jika orang indonesia tidak menekankan dan menegakan nilai-nilai ini, masalah akan datang dari semua aspek yang mungkin membahayakan diri sendiri dan orang lain. Menjaga keutuhan nilai-nilai pancasila adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai bangsa indonesia untuk menjaga keutuhan negara ini bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah dasar bangsa, ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dijunjung dibawah pimpinan bangsa indonesia, dalam bermasyarakat, bernegara, dan negara ini mewujudkan cita-cita untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Nilai-nilai luhur diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa, dengan nilai-nilai

dasar secara umum diterima bahwa itu tidak berubah seiring waktu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, kode nasional Indonesia terdiri dari lima sila, yang intinya adalah sistem filosofis. Pancasila adalah pedoman bagi negara Indonesia dengan nilai-nilai ini sangat penting untuk implementasi.

Pancasila sebagai ideologi dan landasan bangsa harus menjadi jiwa yang menginspirasi semua mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila itu bagus sampai hari ini, ideologi dan dasar negara yang kokoh. Pancasila juga masih tercantum dalam konstitusi kita, meskipun telah melalui beberapa kali perubahan dan perubahan-perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti memberi kekuatan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti memberi kekuatan bagi masyarakat Indonesia, maka perlu dijelaskan, dipikirkan dan diingat oleh semua komponen bangsa.

Negara Hukum Pancasila

Negara Pancasila mengandung lima prinsip, yaitu yang pertama, prinsip ketuhanan yang maha Esa. Asas ini tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa “maka kemerdekaan bangsa Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berdaulat oleh rakyat berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang percaya kepada Tuhan, beragama dilakukan secara beradab, dan hubungan antar umat beragama, peribadatan dan toleransi harus didasarkan pada Tuhan.

Kedua, prinsip kodrat yang Universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, serta persamaan, persamaan hak dan kewajiban, tanpa membedakan ras, keturunan, agama, ras, warna kulit, status sosial dan orang lain. Pembukaan UUD merupakan perwujudan dari prinsip kemanusiaan hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yang terlihat pada lembaga-lembaga yang diciptakan untuk menampung segala ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, prinsip kesatuan kebangsaan atau kebhinekaan, bahwa setiap warga negara memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri, berdaulat dan karenanya tidak

membiarkan adanya campur tangan (intervensi) dalam urusan dalam negara oleh negara lain.

Keempat, demokrasi deliberatif atau prinsip kedaulatan rakyat. Perwujudan asas ini dapat dilihat dari pengakuan pemerintah oleh rakyat, terlihat bahwa presiden tidak dapat membuat peraturan pemerintah, tetapi pertama-tama, adanya undang-undang berarti presiden tidak dapat membuat peraturan pemerintah tanpa adanya peraturan pemerintah dan persetujuan rakyat.

Kelima, prinsip keadilan sosial. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan jaminan sosial dan menyelenggarakan unsur-unsur sosial didalam negara. Negara hukum Indonesia disatu sisi berorientasi ke Barat dan di sisi lain mengacu pada nilai-nilai budaya Indonesia. Gagasan negara hukum inilah yang mendorong berkembangnya model negara hukum versi Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum.

Pancasila adalah falsafah, dasar negara dan landasan pencerahan, sumber inspirasi dan landasan pemecahan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Hukum negara Pancasila memiliki beberapa nilai, yaitu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, asas penyelesaian sengketa secara musyawarah dan jika perundingan gagal, keadilan sebagai upaya terakhir.

Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila diterjemahkan ke dalam cita-cita hukum dan prinsip-prinsip hukum, yang kemudian dirumuskan dalam konsep hukum nasional Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hukum negara Pancasila bersifat koleksi, Individual dan religius. Wujud dari sifat-sifat tersebut adalah keseimbangan, keserasian. Hukum nasional adalah nilai-nilai kemanusiaan, sehingga harkat dan martabat tetap terjaga dan jika mengganggu kerukunan hidup bersama harus disesuaikan.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia merupakan negara hukum, yaitu segala aspek kehidupan dalam bidang masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan termasuk dalam pemerintah juga harus berdasarkan hukum sesuai dengan bentuk elemennya yang selalu menunjang satu dengan yang lainnya, dengan cara mengatasi permasalahan yang selalu timbul dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. penyusunan cara hukum nasional diinginkan lahir produk yang demokratis.

1. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa

Nilai ketuhanan yang maha Esa yakni landasan spiritual, moral dan etik. Diantaranya ciri pokok dalam negara hukum Pancasila yakni adanya jaminan terhadap keluasaan beragama (freedom of religion). Mochtar Kusumaatmadja berbicara, asas ketuhanan mempercayakan bahwa tidak boleh pembuatan hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau membatalkan atau bertentangan dengan agama. Sila ini menanggung kebebasan beragama sebab makna kemerdekaan beragama untuk bangsa Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, implementasi sila pertama yaitu:

- a. Saling menghormati sesama agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia itu berbeda-beda, jadi dalam hal ini saling menjaga toleransi.
- b. Mengarahkan agama dengan memperhatikan situasi sekitar dan tidak mengganggu harmoni dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Tidak menuntuk kehendak untuk menganut satu agama tertentu.

2. Nilai kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tercantum pemahaman hukum lalu setiap warga Indonesia lebih mendahulukan prinsip manusia yang sistematis mengandung bahwa pembuatan hukum harus menunjukkan watak dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memikul implikasi memperlakukan setiap warga negara dengan dasar pengakuan dan harkat martabat manusia. Penerapan sila kemanusiaan ini dilakukan melalui hal-hal berikut

- a. Menghargai perbedaan ditengah-tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat.
- b. Untuk menghargai perbedaan ini, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Selalu menjaga adab dan kesopan, budi pekerti diberbagai situasi.

3. Nilai Persatuan

Dalam sila persatuan Indonesia memuat nilai-nilai Pancasila menentukan persatuan, kesatuan, serta kebutuhan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kebutuhan pribadi dan kelompok. Persatuan Indonesia tergantung dengan pemahaman kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dibesarkan atas dasar Bhineka

Tunggal Ika, Untuk memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam pengetahuan Mochtar Kusumaatmadja, dalam nilai persatuan dan kesatuan mendelegasikan bahwa hukum Indonesia harus menggunakan hukum nasional bagi seluruh Rakyat Indonesia. Jadi apa sih yang yang biasa kita lakukan untuk menjaga persatuan Indonesia dan mengaplikasikan sila ketiga Pancasila yaitu:

- a. Mengesampingkan opini pribadi dan mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia.
- b. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negara agar perekonomian di dalam negara menjadi lebih maju.

4. Nilai-nilai Kedaulatan Rakyat

Nilai persatuan Indonesia bermula pada asas kedaulatan rakyat, dengan mendekati segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas dan minoritas. Nilai persatuan Indonesia memuat makna adanya usaha untuk bersatu dalam kesatuan rakyat untuk meningkatkan nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sila ini menekankan segala kegiatan pemerintah diperuntukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pengaplikasian pancasila sila keempat yaitu:

- a. Selalu ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihannya.
- b. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam bermasyarakat.

5. Nilai Keadilan Sosial

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memahami hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki menyimpan unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal. Yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima yaitu:

- a. Selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan.
- b. Bersikap adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan dengan siapapun kita berhubungan.
- c. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan.

Kesimpulan

Dalam rangka melestarikan nilai-nilai Pancasila, maka tidak terlepas dari sebuah implementasi nilai-nilai Pancasila yang dapat diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya di era digitalisasi saat ini. Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait perwujudan nilai-nilai Pancasila di era digital, maka hal tersebut dapat dilestarikan melalui kehidupan berbangsa dan bernegara dengan fokus pada masing-masing nilai Pancasila di era digital.

Daftar Rujukan

- A. W. Eddy, 2018, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jurnal dhasmasmurti, no 18, vol 1.
- A. FGulton, 2010, dialog tranformatif Agama dan kekerasan. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Ktolik.
- AzharyTahir, 1992, Negara hukum suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasikan pada periode negara Madinah dan masa kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- ArrsaRia Casmi, 2010, "Rekontruksi Paradikmatik Negara Pancasila Sarana Mendorong Kemajuan Bangsa", Makalah.
- Damhuri, 2016, D. implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ittihad jurnal kompertais wilayah kalimantan. Vol 14, no 25.
- Dwiyanto, 2016, pengalaman nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari Ittihad jurnal kompertais wilayah kalimantan. Vol 14, no 2
- Latif Yudi, 2011 Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Kompas Gramedia.